

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
13-12-2019	13-12 s/d 26-12-2019	25-12-2019	30-12-2019	25-01-2020

*Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1 No. 1, Januari 2020 (24-37)*

Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## ***Western Interest* dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel**

**Tika Tazkya Nurdyawati**

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran  
tika18002@mail.unpad.ac.id

### **Abstract**

The Israeli-Palestinian conflict which is often found to continue for more than 7 decades is inseparable from the root of the problem itself, namely; designation of the Palestinian territories as a national home for the Jews which would later lead to Israeli independence in 1948. Referring to the Balfour Declaration 1917 under the British decision, the massive migration of Jews from Europe to Palestine was inseparable from the benefits that were gained by Western hegemonies in the West. the winner of the war at the time. This can be studied using a realism perspective which views the state as a rational actor with all its decisions under the national interest. Using the literature review method, this article tries to answer whether the tension that occurs in the Israeli-Palestinian conflict is based solely on differences in religious identity between the two? Or are there interests of several parties that do not appear on the surface? Why can the annexation case in the formation of an Israeli state that violates international law continue without strict sanctions? The economic and political motivated interests of the West and the connection of Zionism in the founding of the state of Israel will be examined as concrete evidence. This article is expected to be useful as a reference for later literature for similar research.

**Keywords:** *Keywords: Israel-Palestine, West, Interests, Ambition*

### **Abstrak**

Konflik Israel-Palestina yang kerap ditemukan terus berjalan selama lebih dari 7 dekade ini tidak terlepas dari akar permasalahan itu sendiri, yakni; penetapan wilayah Palestina sebagai *national home* bagi kaum Yahudi yang nantinya mengarah pada kemerdekaan Israel tahun 1948. Mengacu pada Balfour Declaration 1917 di bawah keputusan Inggris, migrasi besar-besaran kaum Yahudi dari Eropa ke Palestina ini tidak terlepas dari keuntungan yang didapatkan oleh para hegemon dunia Barat pemenang perang pada saat itu. Hal ini dapat dikaji menggunakan kacamata realisme yang memandang negara sebagai *rational actor* dengan seluruh keputusannya yang dipayungi

kepentingan nasional. Dengan menggunakan metode kajian literatur, artikel ini berusaha menjawab apakah tensi yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina semata-mata didasari perbedaan identitas agama antar-keduanya? Ataukah terdapat kepentingan beberapa pihak yang tidak muncul pada permukaan? Mengapa kasus aneksasi dalam pembentukan negara Israel yang melanggar hukum internasional ini dapat terus berlangsung tanpa sanksi tegas? Kepentingan bermotif ekonomi dan politik negeri Barat serta koneksi Zionisme dalam pendirian negara Israel ini akan dikaji sebagai sebuah bukti konkret. Artikel ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi acuan literatur dikemudian hari bagi penelitian sejenis.

**Keywords:** *Israel-Palestina, Barat, Kepentingan, Ambisi*

## PENDAHULUAN

Kekalahan Ottoman yang membawa Inggris sebagai pengambil kontrol, menjadikan wilayah yang dikuasainya masuk ke dalam sistem otoritas Inggris. Kepemilikan wilayah Palestina ini berjalan seiringan dengan kebijakan untuk mendirikan “*national home*” bagi para Yahudi. Melalui Balfour Declaration 2 November 1917, Inggris menjamin hak-hak sipil dan keagamaan dari komunitas non Yahudi di sana. Namun dalam pengimplementasiannya, penetapan wilayah ini justru menjadi akar konflik berkelanjutan Arab-Israel yang nantinya menghasilkan *ethnic cleansing of Palestine* 1948.

Ikatan historis kaum Yahudi dengan tanah Palestina yang disebut secara eksplisit di dalam kepercayaannya memang menjadi faktor penguat dan identitas dari konflik ini. Bila mengacu pada aspek historis, Yahudi pada saat itu menjadi kaum yang terpersekusi di Eropa. Terlebih dengan adanya slogan anti-Semitism yang kerap dipelopori oleh Jerman. Dalam hal ini, Inggris sebagai pemegang kontrol hadir untuk menaruh simpati dengan menawarkan beberapa daerah untuk hunian Kaum Yahudi. Di balik itu, pemerintahan Inggris memiliki koneksi erat dengan para Zionis. Keikutsertaan Yahudi dalam pasukan Inggris juga menjadi suatu indikasi bentuk faktor internal pengaruh perumusan deklarasi ini (Gilbert, 2008).

Milton Friedman dengan pemaparannya “*there is no such thing as a free lunch*”, menjadi sebuah konsepsi dasar interaksi antar-negara dalam perpolitikan internasional. Sebagai negara yang memiliki ambisi dan tujuannya masing-masing, para pemenang perang dan sekutu Inggris pastilah mengonsiderasikan keuntungan yang mereka dapatkan dari didirikannya “*national home*” bagi bangsa Yahudi di Palestina. Penemuan dengan dijabarkannya kepentingan terselubung yang ada pada motif simpati Inggris ini penting untuk diketahui. Mengingat bahwa konflik Palestina-Israel yang secara konkret telah melanggar hukum internasional namun kerap terlindungi secara rapi. Pengetahuan yang didapat dari artikel ini dapat menjadi akumulasi penolakan kesewenangan hegemon dalam ranah global; menjadi sebuah entitas yang kebal hukum demi kepentingannya.

Analisis kepentingan Barat ini juga kerap disinggung oleh Carly Beckerman dalam *British Foreign Policy Decision-Making Toward Palestine During the Mandate (1917-1948)*, di dalamnya ia menyinggung Churchill White Paper 1922 tentang alasan Inggris memilih Palestina untuk pembentukan rumah bangsa Yahudi. Namun artikel ini tidak menyinggung kepentingan dari sisi internal pemerintahan Inggris. Pembahasannya sejauh penyesalan Inggris atas meningkatnya tensi

kekerasan yang terjadi antara Israel dan Palestina selepas migrasi Yahudi. Padahal, hal ini menjadi sebuah fokus yang dihindari oleh Inggris dengan menekankan batas status quo masing-masing agama (Bunton, 2013).

Artikel ini mencoba memaparkan ranah lainnya yang sebenarnya menjadi akar permasalahan konflik yang selalu ditemukan tengah berjalan ini. Banyak dari para ahli menganggap apa yang terjadi pada Palestina dan Israel sebagai suatu hal implementasi *worldwide religious lookouts* dalam ranah Hubungan Internasional yang semakin kompleks (Sulaeman, 2018). Tensi utamanya hanya kontradiksi kedua agama; Islam dan Yahudi dengan asas kitab keduanya yang saling mengklaim wilayah *holy land* ini (Landau; Fox, 2004; Hamli, 2004; Hizwan, 2018; Barsiman, 2010). Para ahli lainnya hanya mendefinisikannya dari kepentingan politik kedua negara yang saling berbenturan; menyangkut rekognisi Israel yang secara moral haruslah dilegitimasi oleh Palestina untuk meredakan konflik secara formal. Namun keengganan Palestina akan *mutual recognition* di atas ambisi ekspansi Israel ini yang menjadi alasan krisis kerap terus-menerus berlangsung (Becker, 2011). Dengan artikel ini, penulis menekankan serta menjabarkan kepentingan terselubung Dunia Barat dalam dukungan penuhnya pada proses pembentukan negara Israel. Penulis juga mengesampingkan pandangan bahwa tensi agama dan politik dua negara adalah alasan utama konflik Israel-Palestina ini. Artikel ini akan dikemas dengan membahas Deklarasi Balfour yang penuh dengan kejanggalan, posisi Israel dalam hukum internasional diselingi dengan pertanyaan mengapa tetap terproteksi? Apakah ada koneksi kuat antara para hegemon dan Zionisme? Artikel ini juga akan memaparkan wilayah strategis Palestina serta kepentingan Barat dalam Unilateralisme Israel (Mikail, 2018, 2019).

## Tinjauan Literatur

Kata “Barat” dalam literatur bahasa Indonesia kian menunjukkan pada negara-negara di Eropa sebagai pusat peradaban yang berada di barat Indonesia. Di sisi lain, kata ini juga menunjukkan sebuah aliansi keterikatan *great power*: mencakup Amerika. Istilah yang merujuk pada pembentukan polaritas ini kian muncul setelah perang dingin dengan terbentuknya blok Barat dengan ideologi liberalnya. Dalam hal ini, penulis merujuk kata Barat pada negara-negara Eropa (terkhusus para pemenang Perang Dunia I); seperti Inggris dan Prancis, dan Amerika Serikat. Keberadaan negara Barat pada interval 1917-1948 menjadi kekuatan yang berada di hierarki atas struktur sistem internasional. Berkaca pada paradigma realisme yang kerap memandang basis hubungan internasional secara keseluruhan merupakan *power struggle among nations* yang saling mengekspansi kepentingan nasionalnya. Selain dengan kekuatan militer, implementasinya juga tertera pada kerjasama yang dilakukan antar-negara. Model ini tidak terlepas dari tujuannya untuk membentuk keseimbangan power dalam pembentukan tatanan dunia (Ari, 1997). Pandangan ini sangat sesuai dengan topik yang didiskusikan. Kerangka pandangan realis sejalan dengan perilaku yang dilakukan aktor di lapangan. Para pemenang perang, tidak mungkin menjalin sebuah kerja sama begitu saja tanpa tujuan yang menghadirkan keuntungan baginya. Secara harfiah, “kerja sama” merujuk pada keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Kesepakatan Zionis dengan para pemimpin Barat akan Deklarasi Balfour di wilayah Palestina pasti mengkonsiderasikan arah kebijakan ini dengan ambisi eksternal para negara Barat (Salsabila, 2019).

Klaim pendirian negara Israel ini semakin menguat. Walau beberapa ahli meninjau dengan kacamata hukum internasional, bahwa hal ini memiliki nilai yang bertentangan. Dalam dinamika regional, kuatnya oposisi Arab dalam penolakan pendirian Israel kian tak dihiraukan (Rachim, 2019). Para pemimpin negara ini dengan percaya diri tetap berdiri dengan sandingan dukungan *international community*. Hal ini dirujuk pada para pemimpin negara hegemon yang juga memiliki kebijakan yang mendukung zionisme; seperti Bush dan beberapa pemimpin Eropa lainnya. Dokumen dukungan persetujuan negara-negara dunia terhadap pendirian negri Israel ini diinisiasi oleh Inggris serta domininya (termasuk India).

Carly Beckerman dalam *British Foreign Policy Decision-Making Toward Palestine During The Mandate (1917-1949)* 2013, memeparkan kebijakan luar negeri Inggris dan dinamika pendorong keputusannya dalam “invasi” kaum migran Yahudi pada Palestina 1917. dalam artikelnya, Beckerman menggunakan Poliheuristic Decision Theory untuk menganalisa betapa krusialnya keputusan yang diambil Inggris untuk masa depan Palestina. Tanpa direncanai, migrasi bangsa Yahudi secara berangsur ini menjadi alasan ekspansi Israel untuk menguasai teritorial Palestina yang semakin menipis, hal ini disinggung dengan alasan garansi keberlanjutan ekonomi yang tengah dibangun oleh negara Israel.

Dalam suara yang kerap dikeluarkan sebagai respons terhadap tensi yang tengah terjadi di wilayah tersebut, Pemerintahan Inggris dan para *stakeholder* pembuat keputusan selalu menyinggung ketidaktepatan mandatnya pada Palestina (*incomplete post-diction*). Sikap Inggris ini kerap dikritik oleh beberapa ahli seperti Beckerman (2013), spanya pada periode tersebut Liga Bangsa-Bangsa menghadapi berbagai macam kendala internasional. Dari kasus yang kerap dibawa oleh Italia yang terus membawa fokus Vatikan, mereka juga menolak beberapa agenda usulan Amerika. Namun, dalam hal ini Inggris berdiri dengan diberikan kesempatan untuk berbicara akan nasib yang terjadi pada Palestina. Barulah dengannya ia berindikasi untuk mendirikan titel rumah kebangsaan Yahudi dengan tujuan untuk menstabilkan wilayah dengan kedamaian jangka panjang. Namun, saat para Yahudi telah bermigrasi dan terjadi tensi dengan bangsa Arab yang kian menetap di sana, Inggris dianggap lepas tangan dan bersikap tidak solutif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu faktor signifikan dalam proses penyusunan artikel. Artikel ini mengacu pada kajian literatur terkait dengan topik yang diangkat yaitu mengenai proses pendirian Israel menjadi negara-bangsa di wilayah Palestina yang memfokuskannya menjadi akar permasalahan konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade terakhir. Dalam hal ini, penulis mencari referensi sebagai bukti keikutsertaan serta peran dunia Barat dalam pengambilan keputusan penetapan negara ini. Dengan prespektif realisme yang memandang bahwa sebuah negara merupakan *rational actor* yang seluruh tindakannya tidak dapat terlepas dari kepentingannya untuk menggapai ambisi masing-masing, maka penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu mengesampingkan pendapat bahwa perbedaan agama menjadi satu-satunya penyebab konflik ini dengan literatur hukum berupa perjanjian formal tertulis. Dengan bahan yang telah dikumpulkan, penulis percaya adanya kepentingan serta keuntungan yang diambil oleh negara Barat terkait dalam dukungannya di pendirian Israel ini. Sumber lain dalam bentuk yang terkait juga menjadi data penunjang dalam tulisan ini untuk memahami lebih jauh peristiwa yang terjadi di

lapangan secara empiris.

Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah cara penelitian yang kerap digunakan untuk menjelaskan topik yang diteliti dengan menggunakan nilai *variable* yang ada dan tidak menghubungkan atau membandingkan dengan *variable* yang lain. Tahapan metode penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

- A. Penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier literatur dari jurnal, artikel atau berita yang telah dipublikasikan.
- B. Penulis menganalisis masalah yang terjadi secara rinci dan memeriksa praktik yang berlangsung secara detail. Identifikasi ini memerhatikan keselarasan dan keakuratan sumber yang dibaca.
- C. Penulis mengakumulatifkan bukti-bukti berupa perjanjian atau aktivitas politik yang dilakukan guna memberikan bukti dari isu yang ada sehingga pembaca dapat melihat realita yang terjadi.
- D. Penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis isu terkait dengan sumber referensi terpercaya.

## PEMBAHASAN

### **Kontroversial *Balfour Declaration***

Melemahnya kekaisaran Ottoman pada masa itu. Sebagai aliansi yang “kalah perang”, teritorial kepunyaan Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman jatuh secara hirarki kepada aliansi pemenang Perang Dunia I yang membentuk sebuah sistem struktur internasional, dengan kata lain terbaca dengan bentuk okupasi dan kolonialisme (Barous, 2018). merujuk pada Skyes Picot Agreement 1916, Palestina sebagai teritorial kecil yang ditinggali oleh bangsa Arab selama lebih dari 1200 tahun ini ditetapkan menjadi wilayah administrasi internasional yang diserahkan pada *British Zone*. Hal ini memberi ruang bagi Inggris untuk membuat Deklarasi Balfour. Pernyataan ini terabadikan dalam bentuk lembaran surat dari Arthur Balfour, *Foreign Secretary* Inggris kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh publik Komunitas Yahudi di Inggris. Keputusan ini dibuat bersamaan dengan munculnya istilah *British Mandate* untuk Palestina.

Berbeda dengan kasus dan ultimatum negara lain yang diberi ruang oleh para negara pemenang untuk mendirikan kemerdekaan negaranya, Palestina justru dengan kesengajaan dijadikan rumah baru bagi bangsa Yahudi-- yang uniknya pada 1917 masih menjadi populasi minoritas dengan presentase kurang dari 10%. Mengiringi mandat tersebut, Inggris selama prosesnya terus-menerus memberi fasilitas serta ruang akan migrasi besar-besaran para Yahudi dari Eropa ke Palestina. Hal ini meningkatkan presentase Yahudi di kawasan Palestina secara pesat.

Hal yang menjadi titik kontroversial ialah naskah yang beberapa waktu kemudian direvisi dari kata “*national home for the Jewish people*” yang bersifat multitafsir dan tanpa asas ajeg dalam

hukum internasional menjadi pendefinisian lebih konkret, “*the reconstitution of Palestine as a Jewish State*”.

Sebagai negara pemenang perang, tentunya segala keputusan yang diambil haruslah beriringan dengan kepentingan serta kesepakatan aliansinya. Dalam kesepakatannya pada War Cabinet 1917, perdana menteri Inggris sepakat untuk memutuskan segala pertimbangan President Amerika Serikat, Wilson dalam setiap deklarasi yang akan diambilnya. Tak terlepas dari pentingnya *Balfour Declaration* yang menuai persetujuan Wilson. Berkaca pada bentuk setiap kata yang ada pada mandat tersebut, tidak ada keraguan bahwa Inggris dan sekutu memberi ruang untuk Yahudi mendapatkan kewenangan superior untuk mendirikan negara di sana. Yang mana, Palestina justru diberi larangan untuk melakukan sedikitpun perkembangan (Tahhan, 2018). Hal ini jelas bertolak belakang dengan “sikap adil” para pemegang kekuasaan saat itu. Pada pembagian wilayah Timur Tengah, tensi seperti ini juga terjadi di Suriah dan Iraq. Namun, perbedaannya di kedua negara tersebut para hegemon menjamin hal-hak para masyarakat setempat .

Sebagai pembuat keputusan, Palestina tak berhenti menyuarakan ketidak bertanggungjawaban Inggris. Mandat yang dikeluarkannya memicu kekerasan dan tensi pada teritori ini. Reaksi yang dikemukakan oleh Inggris juga justru memperburuk konflik yang tengah terjadi. Kebijakan ini justru diiringi dengan adanya *Passfield Reversal*, sebuah periode pembuatan keputusan Inggris terhadap pembentukan *national home* bagi bangsa Yahudi ini.

### **Koneksi Zionis dengan Pemimpin Barat Sebagai Alasan Amannya Tindakan Aneksasi Israel**

Pendirian negara Israel atas wilayah Palestina menjadi konflik yang tercatat menjadi invasi yang bertensi perang terlama dalam catatan sejarah modern; yakni berlangsung selama lebih dari setengah abad. Selama itu pula, setiap perlawanan yang dilakukan oleh penduduk Palestina dibalas dengan tindakan represif tentara Israel. Dalam catatan Amnesty Internasional, terbukti bahwa Israel dalam lapangan melakukan kesemena-menaan dengan menembak, memenjarakan dan mencabut hak para warga Palestina yang secara subjektif mereka nilai memberontak.

Pada kajian penguasaan wilayah ini, penulis sepakat bahwa pada dasarnya setiap negara memang memiliki kemungkinan untuk memperluas wilayah yang dimilikinya, diantaranya melalui; (1). *Akresi/Accretion*, yaitu penabahan wilayah berdasarkan faktor alam yang terjadi, seperti munculnya pulau atau tanah baru yang disebabkan karena adanya pergeseran lempeng bumi atau erupsi, (2). *Cessi/Cession*, yakni memperoleh wilayah melalui perjanjian sebagai akhir dari masa peperangan. Cessi menjadi sebuah dasar kuat bagi suatu negara untuk mendapat kedaulatannya. Posisi Israel pada hal ini tidak dapat didefinisikan dalam jenis perluasan kekuasaan berdasar Cessi. Perjanjian yang diberikan oleh Inggris dan Prancis dalam Skky Picot dengan membagi kekuasaan Ottoman bukanlah Cessi. Begitupun yang ada pada deklarasi Balfour karena hal itu bukanlah “kesepakatan” melainkan sebuah “keputusan” sepihakk saja. (3). *Okupasi/Occupation* adalah penguasaan suatu wilayah atas suatu negara yang berdiri sendiri (terlepas dari kedaulatan negara manapun) dilengkapi dengan tujuan untuk menjadikan negara tersebut bagian dari kedaulatan negaranya.

Hal ini biasanya terjadi pada *terra nullius* atau wilayah yang baru saja ditemukan. Kasus ini ada pada penemuan Western Sahara, secara hukum pengadilan mendeklarasikan tiada atasnya penduduk asli ataupun organisasi yang secara administrasi memiliki klaim atasnya. Berkaca pada tindakan Israel pada masa proses pendirian sebelum kemerdekaannya tahun 1948, tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan okupasi. Palestina secara historis telah diduduki oleh bangsa Arab jauh sebelum Zionisme datang. (4). Preskripsi/*Prescription*, yakni penguasaan yang dilakukan dengan cara *de facto*; sulit secara legal diterima dalam hukum internasional. Karena hanya bersifat peristiwa yang tidak melibatkan asas formal di dalamnya. Apabila wilayah terkait menolak preskripsi tersebut maka penambahan wilayah ini bersifat gagal. Begitupun yang terjadi pada Israel. Warga Palestina tidaklah menerima segala bentuk pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Sebaliknya, respons Palestina hanyalah berupa penolakan, penentangan, hingga sampai titik pendeklarasian perang. (5). Aneksasi/*Annexation* adalah cara memperoleh wilayah tertentu secara paksa berdasarkan dua ketentuan. Pertama, wilayah yang teraneksasi memang sudah dikuasai secara menyeluruh oleh negara yang melakukan aneksasi.

Kedua, kondisi wilayah tersebut secara hierarki haruslah sudah berada di bawah penguasaan negara terkait. Cara ini secara hukum jelas menentang pasal-pasal yang berada dalam hukum internasional dan institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. "...*the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every state in the area can live in security.*", yang dapat dimaknai dengan tidak diterimanya sebuah cara penguasaan wilayah menurut aneksasi demi perdamaian bersama. Dalam Kellogg Briand Pact 1928 (Pakta Prancis), mendeklarasikan larangan perang untuk instrumen kebijakan nasional negara. Secara norma dan hukum internasional, setiap negara haruslah menahan diri dari penggunaan perang dalam integritas teritorialnya. Maka dari itu, jelas bahwa apa yang dilakukan Israel kepada Palestina merupakan bagian dari aneksasi yang ilegal.

Pertanyaan lainnya bermunculan, lantas mengapa pendirian negara Israel ini seolah aman terproteksi tanpa adanya tindak lanjut dari hukum atas kesewenang-wenangan Israel yang sudah sangat memunculkan jutaan korban akan konflik yang tengah terjadi? Jawabannya tidak jauh dari para peran yang ada dibalik suara internasional. Bahkan, Persekutuan Bangsa-Bangsa pun berada "dibalik" kendala para Dewan Keamanan. Relasi kuat antara para Zionisme dengan *world's leader* merupakan sebuah alasan paling kuat yang menjadi pengukuh serta proteksi bagi Israel. Dalam proses pendirian negara Israel akan keputusan *national home* Inggris, dapat dikaji dengan komposisi pemerintahan Inggris yang ternyata memiliki kecondongan terhadap Zionis dan mengarahkan kebijakannya untuk mendukung Yahudi.

Dukungan ini juga salah satunya disebabkan oleh aliansi yang digenggamnya; Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara adidaya *great power* pada masa itu dengan gamblang telah dianalisa oleh Giplin, bahwa komposisi kekuatan motifnya kepada wilayah Timur Tengah terbagi menjadi 3; (1). kepentingan ekonomi untuk menguasai minyak demi dominasi global oleh kaum ultranasionalis, (2). para kaum neo-konservatif yang mendorong penguasaannya, serta (3). Para Kristen Evangelis yang memiliki keyakinan teologis. Dalam kepercayaannya, mereka percaya bahwa di akhir zaman mereka haruslah bersekutu dengan Israel. Tiga komposisi kuat domestik menurut Rossenau akan sangat memengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Hal ini merupakan sebuah strategi agar Inggris berada dalam tahap kejayaan hingga perang berakhir. Hal ini juga nantinya membawa keberlangsungan izin Inggris dalam 31 tahun pelaksanaan mandat Liga Bangsa-Bangsa atas Israel. Seorang Komisaris Tinggi dari Inggris justru menjadi pemegang keputusan yang memberi ruang bagi para Yahudi untuk membangun dan mengembangkan rumah nasional mereka. Kebijakan tersebut yang menjadi landasan akan amannya ekspansi Israel yang meluas ke kedua sisi Sungai Jordan.

Meskipun di lapangan konflik ini dikecam keras oleh para oposisi yang berada di negeri Arab, namun pergerakan ini akan terus-menerus lebih lemah karena secara struktur hierarki politik Internasional, seberapa kuat para *developing country* mencoba untuk meng-*counter* para hegemon, tetaplah akan bersifat adaptif pada hukum yang ada. Pada posisi ini dalam perkembangannya menjadi negara, Israel tetap bersiri dengan percaya diri karena dukungan yang vokal dari para pemimpin dunia; terkhusus dunia Barat.

### ***Western Interest dalam Unilateralisme Israel dan Posisi Strategis Wilayah Palestina***

Respons Palestina yang kerap melawan kesewenangan Inggris ini menjadi sebuah tantangan bagi strategi militer Inggris. Pada dasarnya, Inggris memiliki kepentingan ekonominya pada negara-negara di sekitaran Timur Tengah lainnya, seperti Mesir, Arab, serta kawasan Mesopotamia. Pembagian kekuasaan Timur Tengah kepada pemegang kue kekuasaan; Inggris dan Prancis juga kerap menjadi perpanjangan tangan praktek imperialisme yang terjadi. Berakhirnya Perang Dunia I, seakan menjadi pintu gerbang bagi para hegemon untuk mengeksploitasi secara “legal” dengan motif *responsibility*.

Perdana Menteri Inggris, Lloyd George pada saat itu setuju untuk melakukan aneksasi secara sembunyi-sembunyi terhadap kekayaan minyak yang dimiliki Palestina. Dibalik hal tersebut, dilakukan pertukaran transaksi kekayaan minyak bersama dengan Prancis yang kerap memiliki kontrol terhadap Suriah. Peristiwa ini menguatkan konsepsi yang dikemukakan oleh Beckerman; Deklari Balfour hanyalah alat penunjang atau instrumen yang digunakan Inggris untuk lebih mengeksploitasi daerah Bulan Sabit yang Subur dengan persetujuan Liga Bangsa-Bangsa dengan pengemasan nilai moral yang penuh simpati (Beckerman, 2013).

Menguasai wilayah Bulan Sabit yang Subur yakni diantaranya Palestina juga merupakan suatu strategi yang paling mumpuni. Pada masa itu Inggris dilingkupi kepentingannya untuk mengontrol dan mengawasi Mesir dan *Suez Canal* untuk memberinya lingkaran pengaruh Inggris semakin kuat dan terjaga. Hal ini jelas merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan politik imperialisme Inggris terhadap Mesir.

Amerika Serikat pun dalam hal ini melihat bahwa pembentukan negara Israel merupakan suatu potensi besar baginya untuk membentuk sebuah aliansi kuat di Timur Tengah (Ramadhan, 2017). Bahkan, pada awalnya Amerika sangat yakin dengan respons positif para negara Arab dengan metode *faith accompli* (Solechien, 2008). Posisi Israel sebagai perwujudan negara demokrasi liberal di Timur Tengah juga sangat menjadi jaminan bagi Amerika Serikat untuk semakin memperkuat pengaruhnya. (1) Secara empiris, Israel telah terbukti dapat mencegah

gerakan radikal nasionalis/*islamic movement* yang ada pada Lebanon dan Jordan, sama seperti apa yang dilakukannya terhadap Palestina, (2). Israel dapat mengekang Suriah dalam beberapa waktu dari aliansinya pada Uni Soviet, (3). Kekuatan militer Israel dapat digaransikan paling kuat dalam kawasan Timur Tengah (IPS, 2002).

Keberadaan Israel ini diiringi oleh ambisi unilateralnya. Bahkan terbaca sejak transfer para migran Yahudi mengokupasi wilayah Palestina dimulai. Dalam konfliknya, kedua belah pihak sama-sama bersikeras dengan prinsip unilateralnya; namun distribusi status ketimpangan kekuatan tetap terjadi. Beberapa ahli memandang posisi Palestina dengan unilateral pihak lemah; salah satunya dengan kerap banyaknya bom bunuh diri. Wilayah ini kian dijulukki dengan *one land, two people*. Dari sini hadirlah posisi Barat yang bersuara dengan bijak untuk kedua pihak meredakan masing-masing tensi. Padahal dalam hal ini, Barat mempunyai ruang kepentingan untuk memiliki pengaruh kuat dalam teritori ini (Cohen, 2012).

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh Negara Barat terhadap proses pembentukan negara Israel di wilayah Palestina merupakan sebuah upaya bagi Barat untuk menaruh kontrol dan pengaruhnya pada wilayah yang kerap disebut sebagai Bulan Sabit yang Subur ini. Sebagai para pemenang perang dan hegemon dunia pada saat itu, Barat secara administrasi memiliki hak dan kewenangan pada wilayah Palestina. Hal ini tidak terlepas dari tahu-menahunya Barat akan sumber daya alam yang berpotensi besar di Palestina. Terbukti dengan eksploitasi minyak yang dilakukan Inggris di Palestina dan membentuk sebuah transi dengan minyak Suriah yang dikuasai oleh Prancis.

Selain motif ekonomi, pendirian negara demokrasi liberal Israel merupakan sebuah strategi penyebaran pengaruh dan ideologi Barat di wilayah Palestina yang secara geografis dapat menjadi fondasi bendungan yang kuat; yang nantinya akan disebarkan pada Mesir dan negara sekitarnya. Dalam hal ini, Negara Barat mempunyai kepentingan politik tersendiri. Mereka menafsirkan sistem kenegaraan federal Timur Tengah menjadi sebuah ancaman dan/atau kompetitor mereka.

Upaya Barat dalam mengimplementasikan kepentingannya dapat dibaca pada Deklarasi Balfour yang menjadi perjanjian acuan dasar bagi Israel untuk bermigrasi dan menduduki wilayah Palestina. Deklarasi yang kerap dikeluarkan oleh Inggris ini ditafsirkan sangat bias. Perjanjian ini mengandung kata-kata yang luas dan disalah artikan. Belum lagi lepas tangan Inggris pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan meningkatnya tensi bangsa Arab di Palestina dan para Migran Israel. Secara hukum internasional, hal yang dilakukan Israel merupakan sebuah aneksasi wilayah yang sangat dikecam. Pertanyaannya, mengapa hal ini terus-menerus berlangsung tanpa sanksi tegas? Jawabannya karena kuatnya koneksi antara para lobi Zionis dengan para Pemimpin Barat. Negeri Barat melihat bahwa negara Israel sangatlah potensial. Dengan beberapa bukti empiris bahwa Israel dapat secara masif mencegah *islamic movement* di Lebanon dan Jordan.

Maka dari itu, penulis menyimpulkan dengan bukti-bukti yang tertera dan pandangan *national interest* yang diusung realisme bahwa kepentingan ekonomi untuk mengeksploitasi dan

politik untuk menaruh pengaruh negeri Barat di Timur Tengah dengan dukungan kuatnya pada pembentukan negara Israel di wilayah Palestina merupakan akar utama mengapa konflik Israel dan Palestina ini tengah terus-menerus berlangsung selama beberapa dekade ini. Tidak sedikit dari para pihak dunia internasional memandang bahwa perbedaan identitas agama adalah faktor utama. Tanpa disadari, beberapa kepentingan dan kontrol dari para hegemon dunia tidak nampak ke permukaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barous, R. (2018). How Britain Destroyed the Palestinian Homeland: 100 years since Balfour's "promise", Palestinians insist that their rights in Palestine cannot be dismissed. ALJAZEERA. <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/britain-destroyed-palestinian-homeland-161102054348710.html>
- Barsiman, Y. (2010). Barriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict. The Jerusalem Institute for Israel Studies. Konrad Adenauer Stiftung.
- Becker, T. (2011). The Claim for Recognition of Israel as a Jewish State. Policy Focus 108. The Washington Institute for Near East Policy
- Bunton, M. (2013). The Palestine Mandate and the Birth of the State of Israel. <https://ri.fgv.br/sites/default/files/eventos/arquivos-relacionados/Cleveland%20&%20Bunton%20-%20Chapther%2013%20-%20p.239-273.pdf>.
- Beckerman, C. (2013). British Foreign Policy Decision-Making Toward Palestine During the Mandate (1917-1948): A Polyheuristic Perspective. Department of Political Science and International Studies School of Government and Society University of Birmingham
- Charters, D. (1989). The British army and Jewish insurgency in Palestine, 1945-47. Springer, 1989
- Cohen, Y. (2012). Western Interest Israel Unilateralism, and the Two-State Solution. Journal of Palestine Studies, Vol. 41 No. 3. University of California Press: Institute for Palestine Studies
- Dockrill, L. (1972). The Mirage of Power: British Foreign Policy Volume II 1914-1922. Cambridge: Routledge, 359
- Fox, J. (2004). The Palestinian-Israeli Conflict: A Case Study of Religion and International Politics. Bringing Religion into International Relations, pp.137-162
- Gilbert, M. (2008). The Story of Israel (Carter) <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171013015049-120-248096/hamas-fatah-jejak-perang-saudara-satu-dekade-sebelum-damai>.
- Hamli, M. (2013). Konflik Israel-Palestina: Kajian Historis atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina (1920-1993). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Hizwan, J. (2018). The Palestine Israel Conflict. Universitas Sains Malaysia
- IPS. (2002). Why the U.S Supports Israel. Institute for Policy Studies. Diakses dari [https://ips-dc.org/why\\_the\\_us\\_supports\\_israel/](https://ips-dc.org/why_the_us_supports_israel/)
- Landau, Y. Healing the Holy Land. United States Institute of Peace. Diakses dari <https://www.usip.org/sites/default/files/pwks51.pdf>

- Malcolm N. Shaw, (2008), *International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Mikail, K., & Fatoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 1-16.
- Mikail, K. (2018). Perjanjian Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Kepentingan USA-Israel di Timur Tengah. *Jurnal ICMES*, 2(1), 69-85.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4064>
- Ramadhan, I. (2017). Lobi Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah. *Intermestic: Journal of International Studies*. Universitas Padjadjaran
- Rahim, M. H. (2019). Post JCPOA. *Jurnal ICMES*, 3(1), 27-52.  
<https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.42>
- Salsabila, F., & Yulianti, D. (2019). Security Dilemma in US-Iran Tensions After Tanker Attack in the Gulf of Oman. *Jurnal ICMES*, 3(2), 200-222.  
<https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.56>
- Solichen, Y. (2008). Kepentingan Nasional dan Upaya Amerika Serikat. FISIP UI. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/>
- Sulaeman, O. (2018). Israel in the Islamic Text. *Jurnal ICMES*, 2(1), 86-107.  
<https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.19>
- Barous, R. (2018). How Britain Destroyed the Palestinian Homeland: 100 years since Balfour's "promise", Palestinians insist that their rights in Palestine cannot be dismissed. ALJAZEERA. <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/britain-destroyed-palestinian-homeland-161102054348710.html>
- Barsiman, Y. (2010). Barriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict. The Jerusalem Institute for Israel Studies. Konrad Adenauer Stiftung.
- Becker, T. (2011). The Claim for Recognition of Israel as a Jewish State. Policy Focus 108. The Washington Institute for Near East Policy
- Bunton, M. (2013). The Palestine Mandate and the Birth of the State of Israel. <https://ri.fgv.br/sites/default/files/eventos/arquivos-relacionados/Cleveland%20&%20Bunton%20-%20Chapther%2013%20-%20p.239-273.pdf>.
- Beckerman, C. (2013). British Foreign Policy Decision-Making Toward Palestine During the Mandate (1917-1948): A Polyheuristic Perspective. Department of Political Science and International Studies School of Government and Society University of Birmingham
- Charters, D. (1989). The British army and Jewish insurgency in Palestine, 1945-47. Springer, 1989
- Cohen, Y. (2012). Western Interest Israel Unilateralism, and the Two-State Solution. *Journal of Palestine Studies*, Vol. 41 No. 3. University of California Press: Institute for Palestine Studies

- Dockrill, L. (1972). *The Mirage of Power: British Foreign Policy Volume II 1914-1922*. Cambridge: Routledge, 359
- Fox, J. (2004). *The Palestinian-Israeli Conflict: A Case Study of Religion and International Politics*. *Bringing Religion into International Relations*, pp.137-162
- Gilbert, M. (2008). *The Story of Israel* (Carter)
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171013015049-120-248096/hamas-fatah-jejak-perang-saudara-satu-dekade-sebelum-damai>.
- Hamli, M. (2013). *Konflik Israel-Palestina: Kajian Historis atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina (1920-1993)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Hizwan, J. (2018). *The Palestine Israel Conflict*. Universitas Sains Malaysia
- IPS. (2002). *Why the U.S Supports Israel*. Institute for Policy Studies. Diakses dari [https://ips-dc.org/why\\_the\\_us\\_supports\\_israel/](https://ips-dc.org/why_the_us_supports_israel/)
- Landau, Y. *Healing the Holy Land*. United States Institute of Peace. Diakses dari <https://www.usip.org/sites/default/files/pwks51.pdf>
- Malcolm N. Shaw, (2008), *International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Mikail, K., & Fatoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 1-16.
- Mikail, K. (2018). Perjanjian Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Kepentingan USA-Israel di Timur Tengah. *Jurnal ICMES*, 2(1), 69-85. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4064>
- Ramadhan, I. (2017). Lobi Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah. *Intermestic: Journal of International Studies*. Universitas Padjadjaran
- Rahim, M. H. (2019). Post JCPOA. *Jurnal ICMES*, 3(1), 27-52. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.42>
- Salsabila, F., & Yulianti, D. (2019). Security Dilemma in US-Iran Tensions After Tanker Attack in the Gulf of Oman. *Jurnal ICMES*, 3(2), 200-222. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.56>
- Solichen, Y. (2008). *Kepentingan Nasional dan Upaya Amerika Serikat*. FISIP UI. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/>
- Sulaeman, O. (2018). Israel in the Islamic Text. *Jurnal ICMES*, 2(1), 86-107. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.19>
- Tessler, M. (2009). *A History of the Israeli-Palestinian Conflict*. Bloomington: Indiana University Press

Tahhan, Z. (2018). More than a century on: The Balfour Declaration explained. ALJAZEERA. <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/10/100-years-balfour-declaration-explained-171028055805843.html>

Utting. The Strategic Information Campaign: Lessons from the British Experience in Palestine 1945-1948

White, D. Britain and Israel. Diakses pada Desember 2019 dari <https://www.cfi.org.uk/downloads/britain-israel.pdf>